

Volume 15 No. 19, Desember 2014

ISSN 1412-1689

# Suluah

Media Komunikasi Kesejarahan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang

## PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

ENSEMBEL MUSIK ANAK ALTERNATIF PEMBELAJARAN MUSIK  
S AISYIAH 1 NANGGALO PADANG

DAN KEBUDAYAAN  
B PADANG

KEARIFAN TRADISIONAL DAN ALIH PENGETAHUAN TEKNOLOGI  
AN KAPAL TRADISIONAL DI DAERAH AIR HAJI LEWAT TUTURAN  
G TUO BAGAN'

MEMBENTUK KARAKTER MELALUI PENANAMAN NILAI-NILAI BUDAYA  
RUMAH GADANG MINANGKABAU

## DAFTAR ISI

Ensambel Musik Anak Alternatif Pembelajaran Musik di SD Plus Aisyiyah 1 Nanggalo Padang  
**Mutiara Al Husna (1)**

Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu  
**Undri (9)**

Dinamika Perkembangan MTI Tabek Gadang Padang Japang  
**Hariadi (26)**

Membentuk Karakter Melalui Penanaman Nilai-Nilai Budaya Rumah Gadang Minangkabau  
**Hasanadi (42)**

Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanaman Harga Diri Bagi Pelaku Prostitusi di Minangkabau  
**Rismadona (60)**

Inklusi Gerakan Nyata Pembebasan Diskriminasi, Benarkah?  
**Silvia Devi (72)**

Tradisi Basapa Ke Gunung Bonsu Nagari Taeh Bukik Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Perspektif Sejarah  
**Zusneli Zubir (82)**

Melacak Kearifan Tradisional dan Alih Pengetahuan Teknologi Pembuatan Kapal Tradisional di Daerah Air Haji Lewat Tuturan 'Si Tukang Tuo Bagan'  
**Jumhari (89)**

Tata Kelola Sawah Dan *Durung* Di Tengah Tradisi Rantau Masyarakat Pulau Bawean M.  
**Alie Humaedi (100)**

Migrasi Orang Minangkabau Ke Negeri Sembilan  
**Witrianto (117)**

Nagari Koto Tuo Kab. Lima Puluh Kota Pada Masa Darurat Sipil (1948-1949)  
**Dedi Asmara (126)**

Komunitas Yahudi di Sumatra's Westkust  
**Romi Zarman (138)**

Kontestasi dan Konflik Elite Tradisional dan Elite Modern Minangkabau dalam Media Massa di Kota Bukittinggi Masa Kolonial  
**Yudhi Andoni (146)**

Ideologi Edward Abbey dalam Novel *Fire On The Mountain* : Suatu Studi Awal Ekologi Sastra  
**Eva Najma (157)**

Resensi Buku  
**Firdaus Marbun (166)**

# KONTESTASI DAN KONFLIK ELITE TRADISIONAL DAN ELITE MODERN MINANGKABAU DALAM MEDIA MASSA DI KOTA BUKITTINGGI MASA KOLONIAL

Yudhi Andoni

## Abstrak

Artikel ini berkontribusi menerima sebagian dan menolak sebagian lainnya tentang konsep *cultural citizenship* yang dikenalkan Henk Schulte Nordholt. Memakai model elite kota Minangkabau di Kota Bukittinggi masa kolonial, dapat dijelaskan bahwa selain memodernisasi dirinya, elite kota Minangkabau di Kota Bukittinggi menjadi perantara ide-ide kebangsaan sebagai tujuan dunia baru mereka. Negara kolonial dianggap tidak lagi dapat memenuhi ekspektasi kemodernan mereka yang terus berkembang. Lewat berbagai media cetak, dan jaringan intelektual yang lintas etnis dan teritori, para elite kota menjembatani pemahaman kebangsaan sebagai tujuan bersama.

## Pendahuluan

Selama kurun 1905-1942 M terjadi kontestasi dan konflik dari dua elite Minangkabau; tradisional dan modern. Kontestasi dan konflik itu mendapat tempat di surat-surat kabar masa itu. Surat kabar zaman tersebut adalah *Berito Minangkabau*, *Hedangan Koerai*, *Berita Koerai* yang merefleksikan pemikiran kelompok elite tradisional, *Aboean Goeroe-Goeroe*, *Medan Poetri*, *Pahlawan Moeda*, yang mengejawantahi pandangan kaum elite modern di Kota Bukittinggi. Kontestasi dan konflik dua elite tersebut terutama menyangkut persoalan modernitas. Tulisan ini hendak menjelaskan kontestasi dan konflik tersebut dalam perspektif sejarah dengan menekankan pertanyaan-pertanyaan; apa yang dimaksud dengan kemodernan?; dan apa tujuan dari kemodernan tersebut?

### 1. Modernitas

Modern sebenarnya adalah definisi yang sulit diungkapkan para elite baru Kota Bukittinggi. Bagi mereka kemodernan atau maju pada masa itu dapat diraih bila mereka dapat mengautentifikasi diri dengan simbol-simbol kolonial yang dianggap lebih baik daripada yang disediakan adat atau tradisi Minangkabau. Pendidikan modern, ekonomi

uang, dan teknologi merupakan produk baru yang memberikan mereka dunia sosial sekaligus kultural baru dan dipandang lebih bermanfaat di masa negara kolonial daripada bergantung pada surau, ekonomi nagari, dan penghulu. Namun pada fase awal menjadi bagian dari kemodernan tidak jalan yang mudah. Mereka di satu sisi merupakan kelompok yang dialienasi oleh kebijakan perubahan masyarakat Minangkabau, dan di sisi lain tawaran produk kemodernan tidak dimaksudkan negara kolonial untuk membentuk satu kelas baru guna menandingi kelas elite tradisional.

Dalam dunia yang tengah berubah pesat di Kota Bukittinggi sejak tahun 1905 M, para perantau-perantau Minangkabau yang datang ke kota ini langsung menghadapi suasana keanonimitasan, ketiadaan identitas. Perubahan masyarakat Minangkabau secara struktural dan kultural oleh negara kolonial di pertengahan abad ke-19 M yang tengah membangun kekuasaannya di dataran tinggi Minangkabau, hanya melibatkan kelompok elite seperti penghulu.<sup>1</sup> Negara kolonial pada

---

<sup>1</sup> Lihat Taufik Abdullah, "The Making of a Schakel Society: The Minangkabau Region in the Late Nineteenth Century", *Papers*, Conference on Modern Indonesian History (Madison: University of Wisconsin, 1975), atau Gusti Asnan, *Pemerintahan Daerah*

konteks ini melupakan peran-peran perantau yang tidak memiliki pengaruh politis. Padahal dalam kehidupan sosial di nagari, para perantau yang kembali ke kampung asalnya itu memainkan peran yang cair dan pada realitas tertentu sangat menentukan kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau.<sup>2</sup> Ketika mereka tidak menjadi bagian dari intervensi politis negara kolonial, maka para perantau-perantau kota itu mengalami fase kediasporaan.<sup>3</sup> Mereka akhirnya dihadapkan pada pilihan menentukan siapa diri mereka sendiri di tengah perubahan yang besar itu. Hal tersebut juga diperparah ketika para penghulu terseret pada kepentingan politis pribadi yang lebih besar—menjadi penguasa politik yang sesungguhnya di nagari—daripada sebagai penjaga masyarakat Minangkabau. Sehingga kala *darek*, dimana para perantau mesti kembali dan memperkayanya dengan pengetahuan, kekayaan, dan hal-hal baru, tidak lagi merespon kehadiran mereka karena penghulu sebagai representasinya terlalu sibuk mengambil bagian politis dari perubahan struktural di tingkat nagari, maka pilihan rasional para perantau-perantau kota itu adalah membentuk dunia kultural mereka sendiri. Apatah lagi sentimen lama bahwa mereka adalah lelaki yang tidak diterima Rumah Gadang seakan kembali menggema, sehingga adat tidak lagi dianggap nilai-nilai yang patut diperjuangkan serta dipakai dalam kekiniaan mereka. Maka dari itu, menjadi bagian dari dunia modern dan membentuk identitas kultural sendiri menjadi pilihan rasional.

Selain itu, menjadi modern dalam konteks jawaban terhadap pengingkaran

---

*Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006).

<sup>2</sup> Terutama perantau-perantau yang sukses menjadi pedagang, kaum terpelajar, dan sebagainya, namun tidak menjadi penghulu.

<sup>3</sup> Diaspora mengacu pada konsep desentralisasi diri dan negosiasi identitas budaya. Lihat Frances Gouda, *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942* (Jakarta: Serambi, 2007, hlm. 18).

kehadiran mereka di masyarakat Minangkabau bagi perantau-perantau itu di Kota Bukittinggi tersebut akhirnya tidak semata menjadi guru, pelajar, saudagar, dan ulama muda. Menurut mereka menyatakan diri sebagai orang modern berarti menjadi orang yang maju dan merupakan upaya politis mereka secara kultural untuk mengaktualisasi diri dalam masyarakat Minangkabau.<sup>4</sup> Maka dari itu, sebagai bagian dari kesadaran “ketertindasan” baik oleh para penghulu dan negara kolonial, elite baru yang menyatakan diri sebagai orang modern itu, mendasari nilainya pada norma-norma dan kehidupan Barat yang mereka temukan ketika berinteraksi dengan simbol-simbol yang diberikan negara kolonial.<sup>5</sup> Mereka mulai membentuk mentalitas dan gaya hidup modern mereka sendiri dengan menegosiasi tawaran modernitas kolonial, dan nilai-nilai lama yang dianggap masih baik.

Pada fase awal elite modern Minangkabau di Kota Bukittinggi secara langsung mengontentifikasi kemodernan mereka pada kolonial Belanda.<sup>6</sup> Namun seiring persentuhan-persentuhan intelektual mereka dengan dunia modern lain sekitar awal tahun 1920an M, seperti Rusia, China, Mesir, dan belahan negara asia lain yang sedang bergolak akibat kolonialisme di satu sisi, dan mulai goyahnya negara kolonial akibat PD I dan serta krisis ekonomi di sisi lain, maka dalam perkembangannya arti kemodernan bagi elite modern Minangkabau di Kota Bukittinggi

---

<sup>4</sup> Lihat Hannah Arendt terkait politik sebagai ekspresi kultural dan tindakan-tindakan di ruang publik merupakan bagian dari usaha politis dalam Eddie S. Riyadi Langgut-Tere, “Manusia Politis Hanah Arendt”, *makalah*, dalam Kuliah Umum Filsafat Komunitas SALIHARA, 6 April 2011.

<sup>5</sup> Ide ini sama halnya dengan pandangan Arendt bahwa emansipasi manusia hanya terjadi melalui penebusan politik dari “keterasingan eksistensial”. Lihat di Eddie S.,...*ibid.*, hlm. 3.

<sup>6</sup> Lihat gambar rumah, pakaian, dan kesenangan berfoto dari kaum elite modern ini seperti, Nawawi St. Makmoer, keluarga Hatta, Syech Djamil Djambek, dan sebagainya.

adalah kebebasan dan kemerdekaan. Elite modern mulai melakukan inisiasi nilai-nilai dan pandangan baru mereka pada masyarakat Minangkabau di Kota Bukittinggi dan menyebarkannya lewat media-media cetak seperti majalah, *Aboean Goeroe-Goeroe*, *Medan Poetri*, *Pahlawan Moeda*, dan sebagainya.<sup>7</sup> Selain itu roman-roman picisan yang diterbitkan di Kota Bukittinggi oleh percetakan Penjiaran Ilmoe dan cerpen-cerpen sezaman dalam media cetak yang terbit di kota ini menjadi media modern lain yang menantang keabsahan adat dalam kekinian.<sup>8</sup> Sehingga pada saat bersamaan arti kemodernan elite baru Minangkabau, yakni kebebasan dan kemerdekaan dianggap bebas dan merdeka dari adat Minangkabau oleh elite tradisional. Hal ini meresahkan mereka, sehingga satu kontestasi kemodernan dalam hal dasar nilai menjadi awal pertarungan simbolik dan wacana dengan para elite baru di Kota Bukittinggi.

Sejak awal ada rasa percaya diri relatif tinggi di kalangan elite tradisional terhadap status dan peranan mereka ketika negara kolonial hadir dan berhasil menghancurkan rival utama mereka, Paderi. Namun rasa percaya itu makin menghilang ketika perubahan struktur kekuasaan didesakan kepada mereka, sehingga para penghulu yang dulunya bebas dan berkuasa penuh pada kehidupan masyarakat nagari ditarik negara kolonial sebagai bagian dari birokrasi yang diangkat, diberhentikan, dan digaji pemerintah.<sup>9</sup> Pada waktu bersamaan, ketika

---

<sup>7</sup> Lihat artikel media-media tersebut dalam kurun 1922-1930 M.

<sup>8</sup> Riset sastra tentang roman picisan ini lihat Sudarmoko, *Roman Pergaoelan* (Yogyakarta: Insist Press, 2008).

<sup>9</sup> Lihat perubahan tersebut dalam Taufik Abdullah, "The Making of a Schakel Society: The Minangkabau Region in the Late Nineteenth Century", *Papers*, Conference on Modern Indonesian History (Madison: University of Wisconsin, 1975), atau Gusti Ansan, *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dari*

pendidikan modern telah menghasilkan cukup banyak lulusan kaum terpelajarnya, jumlah saudagar semakin tumbuh, dan ulama muda seperti Syech Djamil Djambek Serta Haji Rasul mendapat tempat dalam masyarakat Minangkabau, jumlah elite tradisional tidak bertambah untuk mengimbangi kaum elite modern tersebut yang pada awal abad ke-20 M masih berpusat di Kota Bukittinggi.<sup>10</sup> Secara kuantitas para penghulu tidak dilahirkan oleh sistem kekuasaan, tapi oleh tatanan adat Minangkabau, sehingga jumlah mereka relatif tidak meningkat dibanding kaum terpelajar, saudagar, dan ulama muda. Maka dari itu, elite-elite tradisional yang lebih banyak berada di luar Kota Bukittinggi mulai membangun aliansi-aliansi dengan koleganya di *luhak* lain dan menjadikan kota ini sebagai arena mengimbangi desakan-desakan nilai-nilai modern elite baru tersebut. Diantara elite tradisional terdidi tersebut, maka perlu menyebut dua nama yang paling berpengaruh; Datuk Sangguno Diradjo<sup>11</sup> dan Datuk Sutan Maharadja. Keduanya mengambil pusat kegiatan yang berbeda, Datuk Sangguno Diradjo di Kota Bukittinggi, dan Datuk Sutan Maharadja di Kota Padang. Namun keduanya memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan

---

*VOC Hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006).

<sup>10</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, Kota Padangpanjang menjadi pusat kegiatan elite modern Minangkabau, terutama di kalangan ulama muda dan kaum terpelajar.

<sup>11</sup> Datuk Sangguno Diradjo ini berumah di Bukittinggi dimana rumahnya menjadi tempat pertemuan pertama kali membahas susunan adat Minangkabau baru yang nantinya dapat disebar ke masyarakat tanggal 20 Februari 1926. Namun baru tanggal 2 Maret pertemuan yang diprakarsai Datuk Sangguno Diradjo diputuskan mendirikan perkumpulan yang dinamakan Perkoempoelan Minangkabau. Perkumpulan ini diakui oleh pemerintah kolonial. Mereka berkumpul setiap hari sabtu di rumah Dt. Sangguno Diradjo. Dalam lanjutannya pertemuan itu juga dihadiri oleh para pejabat pribumi seperti asisten demang Bukittinggi. Lihat *Berito Minangkabau*, edisi No. 4 Tahun 1, 21 Mei 1926.

elite tradisional Minangkabau lewat media seperti *Berito Minangkabau*, *Perkoempoelan Minangkabau*, dan *Syarikat Adat Alam Minangkabau* (SAAM). Namun diantara dua datuk ini, maka Datuk Sangguno Diradjo dapat disebutkan sebagai “bapak perumus adat Minangkabau modern”.

Datuk Sangguno Diradjo lewat pengajian adat yang dilakukan di setiap sabtu di rumahnya berusaha menyatukan pemahaman akan keminangkabauan yang selama ini tersekat-sekat dan memiliki tafsir yang eksklusif di tiap nagari. Ia pun berusaha menyebar ide-ide adat modernnya itu lewat pelbagai buku-buku tentang adat, dan menjadi rujukan bagi penghulu di nagari-nagari di Sumatera Barat kala itu.<sup>12</sup> Dalam konteks kontestasi kaum elite tradisional terdidik ia menjadi juru bicara yang gigih dan berpengaruh di kalangan penghulu di dataran tinggi Sumatera Barat, terutama ketika ia secara hukum memenangi perkara dengan tokoh ulama muda dan organisasi pergerakan paling berpengaruh kala itu, Sumatera Thawalib di pengadilan terkait pemikirannya terhadap adat Minangkabau.<sup>13</sup> Datuk Sangguno Diradjo tahun 1919 M menerbitkan buku, *Tjoerai Paparan Adat Lembaga Alam Menangkabau*.<sup>14</sup> Ia juga tahun 1921 M menerbitkan buku baru *Mustika Adat Alam Minangkabau*. Buku ini merupakan jawaban terhadap perubahan yang tengah terjadi di masyarakat Minangkabau akibat kemunculan

mentalitas dan gaya hidup elite modern di Kota Bukittinggi.

Selain di media tulis menulis, Datuk Sangguno Diradjo juga membentuk satu organisasi bernama *Perkoempoelan Minangkabau* (PM) di tahun 1926 M.<sup>15</sup> Perkumpulan ini bertujuan “membangkitkan dan manbangoenkan adat kita Minangkabau”, lewat diskusi, dan menyebarkannya ke masyarakat umum. Para elite tradisional terdidik yang terhimpun dalam PM menolak, “sagalo jang akan mendatangkan kehinaan kemaloean, kemelaratan dan kemoendoeran bagi tanah Minangkabau dan isinjo”. Mereka pun mendirikan media khusus menyebarkan ide-ide revitalisasi adat tersebut melalui majalah *Berito Minangkabau* dan mengajak pada persatuan seluruh elite tradisional di dataran tinggi Minangkabau;

“Oleh sebab itoe, besarlah harapan kami kapada padoeka-padoeka angkoe-ankoe ninik mamak serta djauhari tjardik pandai, akan soedi menjokong (menoenjang) peroesahaan kami terseboet, akan goena paninggikan darjat bangsa juga manoeroet ‘adatnja, serta akan memadjoekan tanah ajer kita ini kapadang keselamatan, moedah-moedahan dengan berkat bersama-sama itoe, dengan berangsoer-angsoer, dapatlah djoga bangsa kita meindjak tangga jang bernama kemoelian dan kemadjoean, jang selaloe menjadi kenang-kenangan oleh bangsa kita sekarang ini.”<sup>16</sup>

Sementara Datuk Sutan Maharadja, merupakan pendiri SAAM di tahun 1916 M. Di SAAM elite-elite tradisional terdidik menunjukkan bahwa adat Minangkabau

---

<sup>12</sup> Karya dari datuk ini adalah; *Hikajat Tjindoer Mata* (Fort de Kock: Merapi, 1923), *Kitab Peratoeran Hoekoem Adat Minangkabau* (Fort de Kock: Lie, 1924), *Kitab Soal Djawab tantangan Adat Minangkabau (Beladjar Adat dengan Tidak Bergoeroe)* (Fort de Kock: Lie, 1927) dan *Papatah Minangkabau* (Fort de Kock: Merapi, 1928). Beliau pun menerbitkan satu berkala yang berjudul *Koempoelan Adat Minangkabau* (edisi 1, 27 Mei 1935).

<sup>13</sup> Dalam hal perkara ini lihat Hamka, *Ajahku*, (Jakarta: Widjaja, 1950), hlm. 74-75.

<sup>14</sup> Bukunya *Tjurai Paparan* (1919 M) ini mendapat kritikan dan polemik dari ulama muda.

---

<sup>15</sup> Perkumpulan ini didukung oleh para elit tradisional dari berbagai nagari seperti Tilatang, Lubukbasung, Pandangpanjang, Solok, Padang, Rao, Kotogadang, dan Suliki. Lihat *Berito Minangkabau*, No. 1, Tahun ke-1, 20 April 1926.

<sup>16</sup> *Ibid.*

bukanlah nilai yang kolot dan tidak dapat dipakai sebagai orientasi kemodernan masyarakat. Adat lewat sifatnya yang tidak lekang oleh panas dan lapuk oleh hujan, serta cair dianggap dapat memberi landasan etis terhadap perilaku kemodernan masyarakat Minangkabau. Maka dari itu, revitalisasi dan signifikansinya dalam kehidupan masyarakat urban sebagai jantung “sekularisasi” oleh kaum elite modern menjadi tujuan suci pendirian SAAM.<sup>17</sup> Datuk Sutan Maharadja bahkan dengan fanatik menyebut para elite modern itu bukan sebagai orang Minangkabau. Baginya yang pantas disebut orang Minangkabau adalah mereka yang secara sadar hidup dan dihidupi dalam sistem sosial Minangkabau, dan menjadikan adat sebagai jalan hidup (*way of life*).<sup>18</sup> Datuk Sutan Maharadja mendirikan organisasi SAAM untuk menjaga Alam Minangkabau jangan sampai dihancurkan oleh kaum elite modern.<sup>19</sup> Organisasi ini bertujuan merumuskan konsep Alam Minangkabau modern.

Selain kiprah dua datuk tersebut, terdapat juga elite-elite tradisional terdidik lain di dalam Kota Bukittinggi di luar kelompok mereka yang direpresentasikan para penghulu-

---

<sup>17</sup> Namun tahun 1930an M, SAAM tidak lagi menghususkan diri untuk berkonflik dengan elite modern lokal. Di era itu peran SAAM tidak lagi sekuat masa Datuk Sutan Maharadja. Salah satu kegiatan yang menunjukkan bahwa pagayuban para penghulu ini ada adalah ketika SAAM Tilatang IV Angkat menerbitkan satu buku kecil mengkritik sekaligus mengirimkan mosi terkait pernyataan resmi PSII bulan Mei 1934 M tentang harta pusaka Minangkabau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang waris. Lihat SAAM Tilatang IV Angkat, *Pembela Adat Minangkabau* (Fort de Kock: Agam, 1934).

<sup>18</sup> Lihat “Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the Early Decades of the Twentieth Century”, dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1972), hlm. 237.

<sup>19</sup> Lihat Taufik Abdullah, ““Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)”, *Monograph Series* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1971), hlm. 28., dan “Modernization in the Minangkabau World”....*op.cit.*, hlm. 237.

penghulu kaum Koerai. Suku Koerai merupakan penduduk asli atau awal dari area Bukittinggi sebelum menjadi kota kolonial. Bagi penghulu Koerai yang disokong oleh elite tradisional lain di berbagai daerah di dataran tinggi Minangkabau, modernitas elite baru di Kota Bukittinggi yang mereka temui sehari-hari coba diimbangi lewat cara yang sama dengan menerima produk kemodernan negara kolonial. Namun bila tujuan elite baru menerima kemodernan Barat karena ingin aktualisasi diri dengan kekinian dan dimotivasi oleh ketertindasan kultural, maka para elite tradisional mendasarinya pada pandangan bahwa suku Koerai sebagai orang Minangkabau dan pemilik Kota Bukittinggi telah berada di posisi kebodohan dan terbelakang.

“Koerai...Bangoenlah! Sementara kota Boekit Tinggi jang terdiri dinegeri Koerai, makin bertambah djoega indah dan ramainja dari sehari kesehari, semetara tidak soenjinja kita dari pada mendengar itoe telah berdiri Studiefonds, roemah-roemah sekolah, perkoempoelan-perkoempoelan, sementara pada tiaap-tiap roengga di Hindia ini telah dipenoehi politiek, jaitoe politiek jang menuju kepada kebaikan negeri dan pendoedoeknja sekalian dan sementara..enz. enz. dalam pada itoe negeri Koerai pendoedoeknja tidak djoega hendak bergerak bangoen keloear dari pada kegelapan..”<sup>20</sup>

Sampai pertengahan tahun 1920an M, wacana dan gerakan-gerakan intelektual elite tradisional terdidik merupakan jawaban terhadap munculnya kaum elite kota seperti kaum terpelajar dan ulama muda yang berpusat di Kota Bukittinggi. Pendirian organisasi, sekolah, dan media cetak dalam periode 1905-1920an M oleh elite tradisional

---

<sup>20</sup> Lihat *Hedangan Koerai*, No. 7, 1 September 1922.

terdidik merupakan jawaban mereka terhadap tantangan kehadiran mentalitas, gaya hidup, dan wacana kemodernitasan dari media seperti *Aboean Goeroe-Goeroe*,<sup>21</sup> *Aboean Saudagar*, dan *Islamic Moderne School* Syech Djamil Djambek di Kota Bukittinggi. Selain itu kemodernan yang mereka raih dengan cerdas dipakai untuk memudahkan capaian-capaian tujuan tradisional mereka yang terdesak oleh modernitas elite baru kota. Selain itu, terdapat gejala munculnya gerakan kultural mengidentikan *Sumatra's Weskust* sebagai Minangkabau. Menurut mereka Sumatera Barat sebagai wilayah negara kolonial adalah tanah air orang Minangkabau.<sup>22</sup> Maka dari itu salah satu cara menganeksasi secara kultural Sumatera Barat, para elite tradisional terdidik lewat opini dan rubrik tanya jawab adat Minangkabau seperti di *Berito Minangkabau*, *Berita Koerai*, *Hedangan Koerai*, dan sebagainya mulai mengidentikan Sumatera Barat sebagai Minangkabau. Mereka menghadirkan rubrik-rubrik tersebut untuk menjelaskan bahwa adat Minangkabau bukanlah hal yang menentang dunia modern hari ini. Adat menurut mereka tidak lagi selingkar nagari, tapi melingkupi orang Minangkabau di Sumatera Barat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Majalah ini menarik dalam konteks penanaman pengaruh dua elite Minangkabau tersebut dalam masyarakat. Meski majalah ini berusaha bersikap netral di awal penerbitannya sebagai media pendidikan bagi guru dan masyarakat, namun dalam perjalanannya berubah menjadi arena bagi kaum elite tradisional terdidik dan modern. Majalah ini sering memuat pikiran-pikiran kedua elite terdidik tersebut, tapi tidak membuka jalan bagi terjadinya polemik.

<sup>22</sup> Lihat surat sekelompok pemuka adat yang ditujukan kepada asisten residen Agam di kota Bukittinggi tahun 1914. Dalam surat yang ditandatangani 65 orang pemuka adat Minangkabau tersebut dinyatakan bahwa keselamatan dan kemajuan Minangkabau hanya dapat diraih dengan bernaung di bawah bendera Belanda (Fort de Kock: 1914).

<sup>23</sup> Dalam beberapa hal, polemik tentang adat Minangkabau tidak dapat dihindarkan diantara elite tradisional dengan kaum elite modern. Lihat polemik Haji Rasul dengan Datuak Sanggoena Diradjo Hamka, *Ajahku..op.cit.* hlm. 71-75.

Sebagai bentuk usaha memasyarakatkan ide adat selingkar Minangkabau tersebut mereka gencar menerbitkan Tambo Minangkabau modern,<sup>24</sup> buku-buku tentang adat, dan kaba-kaba klasik dalam huruf latin dan berbahasa Melayu tentang Minangkabau lampau yang jaya dan hebat. Kaba *Tjindua Mato*, kaba klasik tentang sejarah kerajaan Minangkabau diterbitkan dan tahun 1923 M dipentaskan di berbagai tempat, termasuk di Sekolah Radja di Kota Bukittinggi.<sup>25</sup> Selain itu secara simbolik perlambang Minangkabau seperti arsitektur tanduk kerbau di atap Rumah Gadang menjadi penanda penting terhadap usaha minangkabaunisasi Sumatera Barat, termasuk di Kota Bukittinggi. Gonjong atau simbol tanduk kerbau itu hadir di berbagai tempat keramaian di Kota Bukittinggi seperti di pasar, atau kalau ada kegiatan simbol ini hadir di gerbang Pasar Malam.<sup>26</sup> Simbol lain dari usaha Minangkabaunisasi di Kota Bukittinggi adalah pada kehadiran gambar Rumah Gadang<sup>27</sup>, munculnya umbul-umbul tiga warna<sup>28</sup> di setiap perayaan, dan pemakaian

---

<sup>24</sup> Tambo ini disebut modern karena tidak lagi dituturkan, tapi ditulis dan dicetak dan diperjualbelikan. Selain itu, Tambo ini telah mengalami proses kodefikasi lewat pertemuan para penghulu di bawah "asuhan" Datuk Sangguno Diradjo sehingga dapat atau berlaku untuk seluruh nagari. Sebelumnya nagari-nagari memiliki tambo-tambo mereka sendiri, dimana cerita tentang asal usul orang Minangkabau menjadi penanda keterikatan satu dengan yang lainnya.

<sup>25</sup> Lihat Taufik Abdullah, "Some Notes on Kaba Tjindua Mato: an Example of Minangkabau Traditional Literature", *Jurnal Indonesia*, Vol. 9. April 1970, hlm. 1.

<sup>26</sup> Lihat *Koleksi Foto KITLV*, No. 32413, tahun 1906-1907, dan No. 33529, tahun 1908.

<sup>27</sup> Gambar ini menjadi trade mark dari majalah *Berito Minangkabau*.

<sup>28</sup> Orang Minangkabau memiliki tiga jenis warna yang menggambarkan tiap luhak yang ada di Sumatera Barat. Warna kuning untuk luhak Tanah Datar, merah untuk luhak Agam, dan hitam untuk luhak Limapuluh Kota.

baju tradisional yang dihadirkan kala adanya perayaan-perayaan.<sup>29</sup>

Secara langsung sesungguhnya tujuan tradisional paling utama dari gerakan minangkabaunisasi Sumatera Barat tersebut adalah jawaban terhadap hadirnya elite modern kota. Dengan mentalitas, kultur, dan serangan ide-ide kemodernan para kaum terpelajar modern Minangkabau di perantauan seperti Abdul Moeis dan A. Rivai kaum elite tradisional terdiri merasa terpojok dan ditinggalkan.<sup>30</sup> Gerakan para elite tradisional terdidik tersebut meski bersifat kultural, namun memiliki nuansa politis. Dengan mengidentikan Sumatera Barat dengan Minangkabau, elite tradisional terdidik tidak saja memberi landasan administrasi yang kuat terhadap konsepsi Alam Minangkabau yang absurd, gerakan ini juga menjadi bandingan terhadap ide-ide menjadikan orang Minangkabau sebagai bagian dari entitas baru yang disebut Indonesia oleh kalangan elite modern. Dalam padangan elite tradisional Minangkabau, kerajaan Belanda dapat diterima sebagai “penguasa yang hilang” oleh sistem desentralistik nagari-nagari yang membuat orang Minangkabau tercerai-berai. Maka dari itu, mereka pun dengan sangat sadar menjadikan diri sebagai bagian dari warga bangsa kerajaan Belanda, dan menerima identitas sebagai warga koloni (*colonized*). Patut juga dijelaskan bahwa para elite-elite tradisional terdidik dengan cerdas mampu memberikan garansi bahwa mereka bukanlah potensi ancaman terhadap negara kolonial meski gerakan-gerakan minangkabaunisasi tersebut mengambil istilah seperti tanah air

---

<sup>29</sup> Lihat foto yang diambil tahun 1937 M kala adanya perayaan memperingati perkawinan Ratu Juliana dengan Pangeran Bernhard di Kota Bukittinggi. Foto Koleksi Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM), Padangpanjang.

<sup>30</sup> Menariknya, gerakan minangkabaunisasi ini ditahun 1950an M justru didorong kedua elite Minangkabau tersebut. Lihat Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950an* (Jakarta: YOI, 2007).

Minangkabau.<sup>31</sup> Adanya tujuan-tujuan tradisional ini dalam kerangka negara kolonial menjadi hal yang membedakan mereka dengan kelompok elite modern.

## 2. Negara Kolonial

Berbeda halnya dengan elite tradisional terdidik tersebut, maka elite modern mulai memandang negara kolonial sebagai kontra-produktif dari perkembangan kemodernan mereka. Para elite modern yang “anak kandung” modernitas kolonial tersebut di akhir tahun 1920an M mulai keluar dari autentifikasi kemodernan mereka dengan dunia negara kolonial ketika mulai berkembangnya jaringan kemodernan para elite modern Minangkabau, terutama pada kelompok kaum terpelajar dan ulama muda. Peran-peran jaringan intelektual mereka dengan perantau Minangkabau di Mesir, Eropa, dan kota-kota utama di Jawa membuka wawasan baru tentang wacana kebangsaan sebagai produk modernitas. Kepulangan kaum cendikia Minangkabau dari Mesir seperti Iljas Jakoeb, Mochtar Lutfi, dan Jalaloedin Thaib ke Sumatera Barat dan menginisiasi Persatuan Muslim Indonesia (Permi) sebagai kelanjutan dari Sumatera Thawalib, di Kota Bukittinggi menjadi fase baru gerakan kemajuan kaum elite modern Minangkabau. Wacana-wacana kebebasan dan anti-kolonialisme mulai dilihat sebagai tujuan kemodernan dalam media-media milik elite modern, seperti *Pahlawan Moeda*, *Medan Poetri*, *Semangat Pemoeda*, dan sebagainya. Selain itu, gairah pencapaian kemodernan yang lebih dari yang ditawarkan oleh negara kolonial mendapat saluran lewat tawaran baru para kaum intelektual “luar” tersebut lewat ide

---

<sup>31</sup> Istilah tanah air di tahun 1930an M merupakan term yang banyak dipakai para kaum pergerakan nasional di Kota Bukittinggi. Namun istilah ini di majalah seperti *Hedangan Koerai* tidak diartikan sebagai produk politik. Mereka memakai istilah itu untuk menggantikan kecintaan pada nagari Koerai. Lihat majalah *Berita Koerai* terbitan tahun 1930an M.

tentang kebangsaan dan Indonesia sebagai ganti dari negara kolonial.<sup>32</sup> Dalam konteks ini kesadaran politik menjadi penting dalam pencapaian tersebut. Maka dari itu, munculnya era pergerakan kebangsaan di tahun 1930an M sampai Jepang masuk (1942 M) merupakan anti-tesis terhadap eksistensi negara kolonial yang tidak lagi menjanjikan masa depan.

Sementara bagi elite tradisional terdidik, negara kolonial merupakan kepastian daripada tawaran Indonesia yang terangkan itu oleh para elite modern. Bagi mereka negara kolonial telah membuktikan bahwa adat Minangkabau bukan ancaman terhadap aturan-aturan politik pemerintah di Sumatera Barat. Negara kolonial menghormati para penghulu dan adatnya, meski reformasi birokrasi pemerintah mengubah susunan politis nagari-nagari.<sup>33</sup> Berbeda halnya dengan para elite modern yang terus menerus mengkritik adat Minangkabau, dan tidak memerlihatkan dimana tempat bagi adat dan penghulu di alam Indonesia yang diangankan tersebut. Maka dari itu, era pergerakan kebangsaan di tahun 1930an M relatif tidak banyak didukung para elite modern terdidik tersebut. Mereka masih melihat negara kolonial sebagai penguasa yang dapat memberi perlindungan terhadap masyarakat dan adat Minangkabau. Bagi kaum elite modern cara pandang elite tradisional terdidik terhadap negara kolonial dianggap sebuah kemunduran masyarakat Minangkabau. Masyarakat mestinya dibawa pada arus

---

<sup>32</sup> Yamin dan Hatta merupakan simbol pemimpin penting dari ranah politik yang hendak dimainkan para elite modern Minangkabau tersebut. Keduanya merupakan perantau Minangkabau yang dianggap memahami dan kaya akan pengalaman tentang dunia maju di luar negara kolonial, sehingga tulisan-tulisan mereka, dan organisasi keduanya seperti PNI Pendidikan disambut antusias para elite modern lokal tersebut, seperti Khatib Sulaiman.

<sup>33</sup> Salah satu bentuk keberpihakan itu di tahun 1934 M pemerintah mendirikan satu museum yang disebutkan sebagai monumen kebesaran adat Minangkabau di Kota Bukittinggi. Lihat SAAM Tilatang IV Angkat, *Pembela Adat Minangkabau*, *op.cit.*, hlm. 39.

pemikiran yang lebih luas, yakni dunia luar yang tengah bergolak pada identitas yang lebih besar yakni bangsa, sebagaimana dicontohkan pada munculnya identitas Turki sebagai simbol entitas baru masyarakat Ottoman.

Keberadaan negara kolonial merupakan isu penting diantara kaum elite Minangkabau di Kota Bukittinggi, terutama dalam periode tahun 1920an sampai Jepang masuk di tahun 1942 M. Selama satu dekade awal abad ke-20 M, kehadiran negara kolonial di Kota Bukittinggi tidak menjadi isu sentral dalam wacana keduanya. Kegagalan Perang Pajak tahun 1906 M tidak jauh dari Kota Bukittinggi cukup memberi sinyal bahwa kekuasaan Belanda tidak akan dapat diganggu gugat secara politis, bahkan secara wacana sekalipun. Ide-ide tentang negara kolonial sebagai sesuatu yang asing (*alien*) tidak terlalu dinamis dibanding di luar Kota Bukittinggi. Di luar, meski sampai tahun 1926/27 M baru terjadi kembali pergolakan bersenjata dalam masyarakat Minangkabau, negara kolonial dan orang Eropa tetap dianggap sesuatu yang asing dan ditolak. Namun penolakan itu lebih hidup lewat berbagai pantun dan istilah yang satiris. Misalnya dalam masyarakat muncul anekdot, *ula apo nan paliang gadang?* (ular apa yang paling besar?), yaitu *ulando* (Belanda), *kuman apo yang paling gadang?* (kuman apa yang paling besar?) yaitu *kumandua* (pejabat kolonial), atau *Balandu minta tanah* (Belanda minta tanah).<sup>34</sup> Isu tentang tentang negara kolonial atau *status quo* mulai mengambil tempat dalam ranah kontestasi diantara elite tradisional dan modern Minangkabau pada awal tahun 1920an M. Para elite tradisional terdidik mulai menyerang wacana-wacana kaum elite modern, dan menunjukkan keberpihakannya pada kehadiran negara kolonial. Pada titik inilah terjadi singgungan dan konflik yang lebih kuat diantara dua elite terdidik Minangkabau tersebut terhadap arti

---

<sup>34</sup> Lihat Taufik Abdullah, "The Making of a Schakel Society: *op.cit.*, hlm. 19.

dan tujuan kemodernan, serta negara kolonial. Namun sampai pertengahan tahun 1930an M, kontestasi lewat organisasi dan media cetak sebagai diorama keterdidikan para elite Minangkabau tersebut di Kota Bukittinggi mulai mengendur karena PD II dan adanya aliansi para generasi ketiga para elite modern tersebut.<sup>35</sup>

Bagi elite tradisional kehadiran negara kolonial selama hampir satu abad merupakan berkah terselubung bagi kedudukan politis, ekonomis, dan tujuan tradisionalnya. Secara politis, pembaruan nagari-nagari dan pembentukan sistem supra-nagari seperti kelarasan, kedemangan, atau keregenan oleh pemerintah memberi jalan kepada penghulu naik pangkat atau berkuasa dalam artian sebenarnya. Sebelum pembaruan struktural tersebut, penghulu tidak memiliki kuasa apa-apa di nagari lain. Mereka tidak dapat melakukan penaklukan-penaklukan untuk menguasai potensi ekonomi nagari luar yang sangat dibutuhkan oleh penduduk nagarinya. Perang antar-nagari tidak dimaksudkan sebagai bagian dari kolonisasi, karena pada hakekatnya sistem matrilineal membuat penduduk satu nagari dengan nagari lainnya berada pada satu filosofi *badunsanak* (bersaudara). Mereka ditautkan oleh identitas kesubsukuan seperti Bodi-Chaniago, dan Koto-Piliang yang ada di setiap nagari. Maka dari itu jabatan-jabatan seperti penghulu kepala, laras, demang, asisten demang, dan seterusnya membuat elite tradisional dapat menguasai dan menentukan hajat hidup banyak orang di berbagai nagari. Sehingga dengan demikian, semakin tinggi tingkat jabatannya, maka semakin besar juga keuntungan ekonomi yang ia dapatkan dari pemerintah berupa gaji, dan masyarakat lewat upah pungut *belasting* atau pajak. Namun hal yang membuat elite tradisional terdidik itu mengambil posisi *pro-status quo* adalah

jaminan negara kolonial terhadap tujuan-tujuan tradisional mereka. Jaminan tersebut tidak dituangkan dalam satu kebijakan resmi, namun dukungan-dukkungan dalam bentuk sedikit sekali kaum adat yang ditindak keras negara kolonial sehubungan gerakan modernisasi adatnya menjadi indikasi tersebut.

Ide tentang Indonesia sebagai produk kemodernan baru kaum elite modern tidak dapat diterima elite tradisional terdidik. Di satu sisi mereka tidak ingin secara frontal menghadapi negara kolonial yang mulai keras merespon gerakan kebangsaan Indonesia itu. Sementara di sisi lain, Indonesia tidak memberi ruang ekspresi yang jelas terhadap peran dan adat Minangkabau. Keengganan kaum tradisional terdidik berhadapan langsung dengan negara kolonial lebih disebabkan trauma terhadap tindakan militer pada gerakan-gerakan anti-Belanda seperti pemberontakan Batipuh<sup>36</sup>, dan Perang Pajak tahun 1908 M tidak berapa lama pasca Paderi. Namun alasan kedualah yang membuat mereka mati-matian menolak konsep keindonesiaan diadopsi masyarakat Minangkabau. Datuk St. Maharadja, Datuk Sangguno Diradjo, dan H. Datuk Toeah Sango merupakan pemikir-pemikir yang bersemangat tentang adat Minangkabau dekade awal abad ke-20 M lewat organisasi dan karya-karya latin mereka. Ketiganya masih percaya bahwa masyarakat Minangkabau dapat meraih kemodernannya tanpa membentuk entitas kultural baru sebagai penanda kemodernan. Namun setelah kematian Datuk St. Maharadja di tahun 1921 M, hanya kedua elite tradisional terdidik ini yang mengambil peran menantang konsep keindonesiaan para elite modern. Namun ide tentang Minangkabau modern redup di awal tahun 1930 M, ketika wacana kebangsaan, keindonesiaan, dan respon negara kolonial yang mulai keras terhadap setiap pergerakan modernis yang dianggap

---

<sup>35</sup> Lihat Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: op.cit.*

---

<sup>36</sup> Lihat efeknya pada Taufik Abdullah, "The Making of...", *op.cit.*

mengganggu ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).

## Penutup

Sejak dekade awal abad ke-20 M, para elite Minangkabau di Kota Bukittinggi merupakan agen perubahan masyarakat Minangkabau di dataran tinggi Sumatera Barat. Sebagai agen perubahan, elite Minangkabau memahami Kota Bukittinggi sebagai anti-tesis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di nagari-nagari. Mereka menegosiasi modernitas yang ditawarkan negara kolonial di Kota Bukittinggi, namun di sisi lain memberi tambahan aksesoris terhadap penerimaan nilai kemodernan itu. Namun pergeseran cara pandang mereka terhadap realitas membuat mereka mesti berhadapan dengan hegemoni struktur kolonial. Pergeseran tersebut mulai terjadi ketika struktur kekuasaan kolonial dan tradisional menganggap otentifikasi kemodernan para elite baru kota tersebut berada di luar ekspektasi (*beyond expectation*) yang mengancam eksistensi mereka. Delegitimasi kekuasaan kolonial dan tradisional atau adat makin dirasakan sebagai sebuah realita ketika elite Minangkabau melakukan eksternalisasi nilai-nilai yang selama ini menjadi habitus di Kota Bukittinggi. Maka berbagai respon atau tanggapan diberikan negara kolonial dan struktur tradisional terhadap tantangan modernitas elite modern Minangkabau dan sebaliknya. Makin luasnya akses informasi, tumbuhnya jaringan intelektual, dan hegemoni kolonial yang mulai terasa politis menumbuhkembangkan paham-paham modernitas alternatif. Alternatif itu adalah modernitas Indonesia yang dicita-citakan sebagai dunia kemajuan baru bagi masyarakat Minangkabau. Pada titik ini hegemoni kolonial terhadap masyarakat Minangkabau khususnya, dan Hindia Belanda secara keseluruhan mulai digugat eksistensinya. Demikian juga halnya dominasi struktur tradisional dalam kehidupan

sehari-hari masyarakat mulai dipertanyakan koherensi sosialnya.

## Daftar Pustaka

- Aboean Goeroe-Goeroe*, Maret 1928.  
*Aboean Goeroe-Goeroe*, No. 1. Januari 1928.  
*Aboean Goeroe-Goeroe*, No. 7. Juli 1928.  
*Berita Koerai*, No. 1 Februari 1938.  
*Berita Koerai*, No. 2 Maret 1938.  
*Berita Koerai*, No. 3 April 1938.  
*Berita Koerai*, No. 4 Mei 1938.  
*Berita Koerai*, No. 5 Juni 1938.  
*Berita Koerai*, No. 6 Junli 1938.  
*Berito Minangkabau*, 10 Agustus 1926.  
*Berito Minangkabau*, 10 Juli 1926.  
*Berito Minangkabau*, 21 Agustus 1926.  
*Berito Minangkabau*, 28 Juli 1926.  
*Berito Minangkabau*, No. 1, Tahun ke-1, 20 April 1926.  
*Berito Minangkabau*, No. 3 Tahun 1, 11 Mei 1926.  
*Berito Minangkabau*, No. 4 Tahun 1, 21 Mei 1926.  
Foto Koleksi Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM), Padangpanjang.  
*Hedangan Koerai*, No. 7, 1 September 1922.  
*Medan Poetri*, 1 Agustus 1933.  
*Medan Poetri*, 1 Juli 1933.  
*Pahlawan Moeda*, No. 2. 15 Agustus 1933.  
*Pahlawan Moeda*, No. 4-5, November-Desember 1933.  
*Panji Pustaka*, Tahun 1923.  
*Pemimpin Kita*, September-October 1930.  
*Perdamaijan* No. 1. Tahun. Ke 1. 10 Januari 1929.  
*Perdamaijan*, No. 2 Tahun. Ke 1, 20 Januari 1929.  
*Perdamaijan*, No. 4 dan 5. Th. Ke-1. 20 Januari 1929.  
*Perdamaijan* No. 6 dan 7. Th. Ke-1. 10 April 1929.

Gouda, Frances., *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*. Jakarta: Serambi, 2007.

History. Madison: University of Wisconsin, 1975.

Gusti Asnan, *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006.

-----, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950an*. Jakarta: YOI, 2007.

Hamka, *Ajahku*. Jakarta: Widjaja, 1950.

Langgut-Tere, Eddie S. Riyadi., “Manusia Politis Hanah Arendt”, *makalah*, dalam Kuliah Umum Filsafat Komunitas SALIHARA, 6 April 2011.

SAAM Tilatang IV Angkat, *Pembela Adat Minangkabau*. Fort de Kock: Agam, 1934.

Sudarmoko, *Roman Pergaoelan*. Yogyakarta: Insist Press, 2008.

Taufik Abdullah, “Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the Early Decades of the Twentieth Century”, dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1972.

-----, “Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)”, *Monograph Series*. Ithaca: Cornel Modern Indonesia Project, 1971.

-----, “Some Notes on Kaba Tjindua Mato: an Example of Minangkabau Traditional Literature”, *Jurnal Indonesia*, Vol. 9. April 1970.

-----, “The Making of a Schakel Society: The Minangkabau Region in the Late Nineteenth Century”, *Papers*, Conference on Modern Indonesian